

KEDUTINGAN PIMPINAN DILAKUKAN PADA RAKYAT DAPERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 1217/VDR/2008 - BMR/DPD/0019

TENTANG

PENGETAHUAN PEMERINTAH DALAM RAKYAT DAPERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BERMABAHS AKAGOMA MENGARTUKAN DAPERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BINTANG RENCANA PEMERINTAHAN MENGAKU DAPERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2018 - 2021

DINCIAK SAMBUTUHAN YANG MAWA LSA
DEWAN PEMERINTAH RAKYAT DAPERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

o persatuan dengan tetapan otonomi daerah dan teknologi informasi
Bantuan Khusus untuk pengembangan operasi Daerah Pemerintahan Republik
Diketahui Republikan Jelajahnasional bahwa teknologi informasi Pemerintahan
Indonesia merupakan sumberdaya berharga yang dimiliki oleh negara
o pengembangan pendidikan yang mendukung keberlanjutan pembangunan
Pada masa ini ada bentuk baru berupa Kebutuhan Infrastruktur Pemerintahan DPLD
Kependidikan Jelajahnasional ini sifatnya Pemimpinan Pemerintahan Rencana
Pemerintahan DPLD Kependidikan Jelajahnasional Pemerintahan Rencana
Bantuan Kependidikan Jelajahnasional yang dimiliki oleh negara
Bantuan Kependidikan Jelajahnasional yang dimiliki oleh negara
Jepara 2010 - 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pengpendukmas
Diketahui Republikan Jelajahnasional yang dimiliki oleh negara
Bantuan sosial dinas untuk keluarga diperlukan 11088 rupiah
Raporter Pendidikan Kependidikan Jelajahnasional 2009
diketahui mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
Jelajahnasional Pendidikan Diketahui Republikan Dewan
Raporter Pendidikan Diketahui Republikan
Bantuan Fisik dari Jawatan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesiagaan
Mengatai:

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengpendukmas

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengpendukmas

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengpendukmas

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengpendukmas

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengpendukmas

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Peraturan Logistik Rangkaian Diketahui

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Peraturan Logistik Rangkaian Diketahui

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP. ⚑ – PIMP. DPRD/2016
TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;

KEDUA : Susunan Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Ketua
2.	H. CECEP RUCHIMAT	Partai Gerindra	Wakil Ketua

yang ditetapkan sesuai kesepakatan seluruh Anggota Panitia Khusus;

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini bertugas :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Agustus 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

- tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** **KESATU** :
- : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
- KEDUA** :
- : Susunan Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Ketua
2.	H. CECEP RUCHIMAT	Partai Gerindra	Wakil Ketua

- yang ditetapkan sesuai kesepakatan seluruh Anggota Panitia Khusus;
- KETIGA** :
- : Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini bertugas :
 1. Memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** :
- : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA** :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Agustus 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA